

Makan Bergizi Gratis sebagai Kebijakan Populis: Dinamika Dukungan Publik dan Tantangan Keberlanjutan

Usep Saepul Ahyar¹, Ridwan Nasution^{2*}, Dimas Ramadhan³, Fadhil Pahlevi Hidayat⁴

¹Universitas Serang Raya

^{2,4}Universitas Islam Sumatera Utara

³Populi Center

*Corresponding Author: ridwan.nasution@fisip.uisu.ac.id

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertujuan untuk mengatasi permasalahan gizi anak di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini memperoleh perhatian publik karena besarnya alokasi anggaran serta munculnya berbagai persoalan implementasi, seperti tata kelola program dan kasus keracunan massal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat dukungan masyarakat terhadap program MBG serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dukungan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh dari survei nasional Populi Center pada Februari 2025 terhadap 1.200 responden yang dipilih melalui teknik multistage random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear untuk menguji pengaruh faktor penilaian evaluatif, afiliasi politik, dan karakteristik demografis terhadap dukungan masyarakat terhadap program MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dukungan masyarakat terhadap program MBG tergolong tinggi, yaitu sebesar 70 persen, dengan tingkat awareness mencapai 91,5 persen. Faktor yang paling memengaruhi dukungan masyarakat adalah persepsi terhadap kapabilitas pemerintah dan approval rating pemerintah, diikuti oleh afiliasi politik. Sementara itu, faktor demografis seperti gender, pendidikan, dan tempat tinggal menunjukkan variasi tingkat dukungan yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan masyarakat terhadap program MBG dipengaruhi oleh kombinasi penilaian evaluatif publik dan identitas politik, sehingga keberlanjutan dukungan masyarakat sangat bergantung pada kualitas implementasi program dan kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis, Dukungan Publik, Legitimasi Kebijakan

Pendahuluan

Sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah memberikan perhatian serius terhadap penanganan gizi, dengan target penurunan gangguan pertumbuhan anak di bawah usia lima tahun (*stunting*) dari sekitar 37 persen pada 2014 menjadi 24 persen pada 2024. Berdasarkan Survei Status Gizi di Indonesia yang dirilis Kementerian Kesehatan tahun 2024, target tersebut hampir tercapai, di mana angka prevalensi stunting sebesar 24,4 persen (BPKP Kemenkes, 2024). Meski terdapat

Article history: Received 24/11/2025; Revised 14/5/2026; Accepted 15/5/2026; Published 10/6/2026



© The Author(s), 2026.

penurunan yang cukup nyata, Global Hunger Index (GHI) tahun 2024 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 77 dari 127 negara, dengan skor 16,9 yang masuk dalam kategori *moderate hunger*. Dalam indeks yang salah satunya memuat *stunting* sebagai komponen, ranking Indonesia masih berada di bawah negara-negara ASEAN seperti Thailand (52), Vietnam (56), Malaysia (61), Filipina (67), Kamboja (68), dan Myanmar (74).

Melihat kenyataan tersebut, tidak mengherankan jika pemerintahan selanjutnya mengambil langkah intervensi gizi yang lebih besar. Pada saat kampanye, pasangan Prabowo-Gibran memang telah menunjukkan keseriusannya untuk memperbaiki kesehatan dan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan pesantren. Janji kampanye tersebut kemudian diwujudkan dengan menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional pada seratus hari masa pemerintahannya. Program tersebut dirancang tidak hanya untuk mengatasi persoalan gizi pada anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ganda melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan produksi pangan lokal (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Lestari et al., 2024; Merlinda & Yusuf, 2025)

Sayangnya, peluncuran program MBG tidak berjalan mulus. Program yang digadang-gadang sebagai salah satu prioritas nasional justru menghadapi kritik karena dilaksanakan bersamaan dengan agenda efisiensi anggaran pemerintah. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 171 triliun, MBG dianggap menyerap porsi APBN yang sangat besar, terutama bila dibandingkan dengan program lain yang juga krusial, seperti peningkatan kesejahteraan 785 ribu guru honorer yang hanya menerima Rp. 11,5 triliun. Perbandingan ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan MBG mengorbankan sektor penting lain yang menyentuh langsung kesejahteraan tenaga pendidik dan mutu layanan pendidikan.

Masalah tidak berhenti pada persoalan anggaran. Sejak awal implementasi, sejumlah kendala teknis mengemuka. Kualitas makanan yang tidak merata di berbagai daerah, laporan sajian yang basi, hingga keterlambatan distribusi menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan standar operasional. Kondisi ini diperparah dengan kasus keracunan massal. Pada September 2025, lebih dari 1.300 siswa di Kabupaten Bandung Barat dilaporkan mengalami sakit perut setelah mengonsumsi menu MBG yang terkontaminasi bakteri *Salmonella* dan *Bacillus cereus*. Kejadian serupa juga muncul di wilayah lain meski dalam skala lebih kecil. Kasus ini dikaitkan dengan lemahnya pengawasan, penyimpanan yang tidak higienis, dan dapur yang tidak terstandarisasi (Detikcom, 2025).

Kritik juga datang dari kalangan pendidik. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai program ini justru menambah beban bagi sekolah dan guru. Di banyak tempat, guru diminta “mencicipi” makanan sebelum dibagikan sebagai langkah pengendalian mutu darurat, meski tidak memiliki kapasitas maupun pelatihan untuk itu. Bahkan ada sekolah yang dipaksa menanggung biaya pengadaan ulang peralatan makan ketika rusak, seperti kasus wadah *stainless* di Ngawi. Ketentuan semacam ini menimbulkan kesan bahwa tanggung jawab program dialihkan kepada sekolah dan guru tanpa adanya kompensasi atau dukungan yang memadai, sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi operator MBG justru tanpa evaluasi apalagi sanksi.

Studi mengenai *school feeding programs* di negara-negara seperti India, Brasil, dan sejumlah wilayah Afrika memperlihatkan bahwa legitimasi publik dan partisipasi masyarakat merupakan prasyarat bagi keberlanjutan program (Dreze & Goyal, 2003; Locke et al., 2025; Sidaner et al., 2013; Wang et al., 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pola serupa juga berlaku pada konteks Indonesia, khususnya terhadap program baru seperti MBG. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk melihat sejauhmana dukungan masyarakat terhadap program MBG, dan faktor apa yang dapat menjelaskan dukungan tersebut. Ini menjadi penting sebab tingkat dukungan publik terhadap MBG menjadi elemen strategis karena akan menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Dengan dukungan yang kuat, program ini dapat menjadi langkah signifikan dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.

Di Indonesia, studi spesifik mengenai faktor yang mempengaruhi dukungan publik terhadap program MBG belum banyak dilakukan. Meski demikian, riset dengan topik kebijakan sosial-kesehatan bisa menjadi rujukan. Riset Nurjakiah et al. (2024) menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap program pemerintah berkorelasi dengan efektivitas program tersebut. Mereka menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam program gizi sangat penting untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Sejalan dengan itu, Haq et al. (2023) dan Qomarrullah et al. (2025) menyatakan bahwa program yang mendapatkan dukungan masyarakat cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan, dalam hal ini meningkatkan status gizi anak.

Beberapa contoh penelitian tentang dukungan publik terhadap kebijakan sosial di Indonesia di atas masih belum memberikan penekanan terhadap beberapa faktor penting seperti persepsi atas kapabilitas terhadap pemerintahan baru terbentuk, evaluasi umum kinerja pemerintah tersebut, serta variabel politik seperti identitas partisan seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut yaitu melihat dukungan masyarakat terhadap program MBG, dengan memperhatikan dimensi politik

dan variasi demografisnya. Hal ini menjadi penting sebab dukungan masyarakat terhadap sebuah kebijakan umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor politik dan persepsi terhadap aktor yang menjalankannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan data survei nasional pada Februari 2025. Survei melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 120 kelurahan/desa pada 38 provinsi. Pemilihan responden dilakukan dengan metode multistage random sampling, dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga rumah tangga, dengan komposisi gender yang seimbang. Analisis statistik dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dukungan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai variabel dependen (Sugiyono, 2015).

Hipotesis utama penelitian ini menyatakan bahwa penilaian evaluatif publik terhadap pemerintah serta afiliasi politik individu berperan penting dalam menentukan dukungan terhadap MBG. Dukungan terhadap MBG sebagai variabel dependen akan diuji oleh dua faktor yang berperan sebagai variabel independen. *Pertama* yaitu faktor penilaian evaluatif, yang dioperasionalisasikan melalui dua indikator antara lain: (1) persepsi kapabilitas, yakni tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membawa Indonesia menjadi lebih baik, dan; (2) *approval rating*, yang merefleksikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kemudian yang kedua ialah faktor afiliasi politik, yang diukur berdasarkan: (1) pilihan capres, dan; (2) pilihan partai politik pada Pemilu 2024.

Untuk menguji konsistensi hasil, sejumlah variabel sosio-demografis juga dimasukkan dalam analisis sebagai kontrol, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan karakteristik tempat tinggal. Seluruh variabel dianalisis dengan pembobotan menggunakan teknik raking atau *random iterative method*, guna menyelaraskan distribusi sampel dengan proporsi populasi sebenarnya (Kalton & Flores-Cervantes, 2003; Moleong, 2014).

Pembahasan

Setelah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dilantik, program MBG masuk dalam delapan program prioritas cepat pemerintahan. Uji coba dilakukan di 47 titik SPPG di 6 provinsi pada 26–28 Desember 2024, sebelum resmi diluncurkan pada awal

Januari 2025 dengan target enam ratus ribu anak sekolah di 26 provinsi. Per akhir Januari, jumlah SPPG bertambah hingga 937 titik.

Berdasarkan data survei yang pengambilan datanya dilaksanakan pada 20–26 Februari 2025, menunjukkan bahwa sebesar 91,5 persen masyarakat menyatakan tahu atau pernah mendengar program MBG, dan hanya 8,5 persen yang belum mengetahui. Tingginya tingkat *awareness* ini tidak terlepas dari gencarnya sosialisasi sejak masa kampanye serta uji coba awal di berbagai daerah. Namun, pengetahuan publik tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan. Seperti ditunjukkan pada Tabel 1, dari responden yang mengetahui program MBG, sebanyak 70 persen menyatakan mendukung (cukup/sangat mendukung), kemudian 9,8 persen tidak/kurang mendukung, 15,9 persen bersikap netral (mendukung tidak, tapi tidak mendukung juga tidak), dan 4,3 persen tidak menjawab. Angka dukungan 70 persen dapat dikatakan cukup tinggi, sekaligus menjadi modal politik awal bagi pemerintah. Berdasarkan distribusi demografis, dukungan relatif merata: perempuan (72,9 persen) lebih tinggi daripada laki-laki (66,8 persen), masyarakat pedesaan (76 persen) lebih tinggi daripada perkotaan (65,2 persen), serta masyarakat dengan pendidikan menengah ke bawah cenderung lebih mendukung dibandingkan kelompok berpendidikan tinggi.

Data ini mengindikasikan bahwa program MBG berhasil membangun legitimasi awal di tengah masyarakat. Dalam studi mengenai dukungan publik terhadap kebijakan kesejahteraan, tingkat pengetahuan dan eksposur terhadap program pemerintah sering kali menjadi faktor penting dalam membentuk penerimaan masyarakat terhadap kebijakan sosial. Penelitian (Garritzmann et al., 2023) menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap reformasi kebijakan sosial cenderung meningkat ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan memahami tujuan kebijakan yang dijalankan.

Tabel 1. Sebaran Dukungan terhadap MBG

	Cukup/Sangat mendukung	Tidak/kurang mendukung	Netral	TT/TJ
Baseline	70,0%	9,8%	15,9%	4,3%
Jenis kelamin:				
Laki-laki	66,8%	12,0%	15,3%	5,9%
Perempuan	72,9%	7,9%	16,5%	2,7%
Tempat tinggal:				

Perdesaan	76,0%	8,8%	10,6%	4,7%
Perkotaan	65,2%	10,6%	20,2%	4,1%
Tingkat pendidikan:				
SD	71,9%	6,8%	15,4%	5,9%
SMP	72,8%	8,1%	14,3%	4,8%
SMA	68,3%	11,8%	16,8%	3,0%
PT	62,0%	18,2%	19,0%	0,8%

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kapabilitas pemerintahan berada pada tingkat yang relatif tinggi, dengan mayoritas responden menyatakan “yakin” (73,2%) dan “sangat yakin” (14,5%). Rata-rata skor kapabilitas tercatat 1,92 dari skala 1–3, yang mendekati kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa legitimasi awal pemerintahan Prabowo–Gibran cukup kuat di mata masyarakat. Sementara itu, *approval rating* terhadap kinerja pemerintah cenderung berada pada tingkat sedang, dengan 62,1% responden menyatakan puas dan 8,9% sangat puas. Skor rata-rata sebesar 1,60 menunjukkan penerimaan publik yang cukup positif, meski tidak setinggi kapabilitas.

Data ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap MBG sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan program. Penelitian (Goubin & Kumlin, 2022) yang menjelaskan bahwa political trust berfungsi sebagai instrumen legitimasi kebijakan publik, terutama pada kebijakan kesejahteraan sosial yang membutuhkan dukungan fiskal dan politik yang besar. Penelitian tersebut menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka semakin besar pula penerimaan masyarakat terhadap reformasi kebijakan sosial.

Tabel 2. Skor Kapabilitas dan Kepuasan Kinerja Pemerintah

Penilaian	Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)	Rata-rata (skor)
Kapabilitas	11,0	73,2	14,5	1,92
Approval Rating	23,1	62,1	8,9	1,60

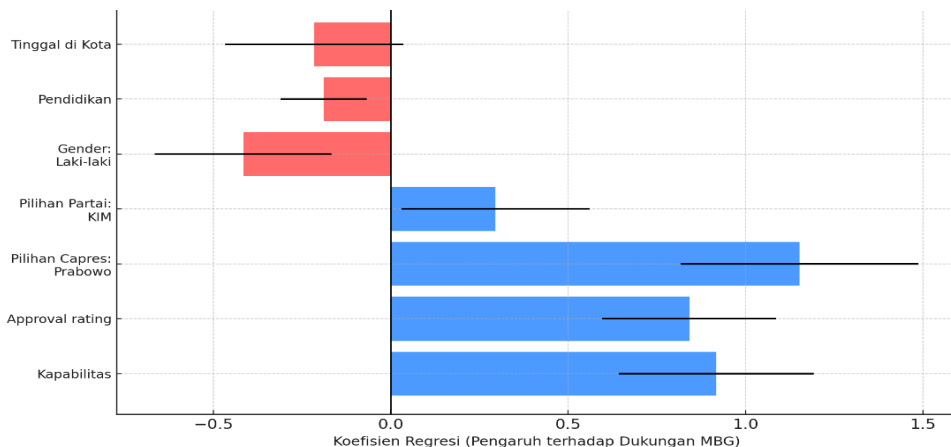
Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Tingginya kapabilitas dan *approval rating* ini penting dicatat, karena dalam literatur kedua faktor tersebut terbukti sebagai penentu legitimasi awal suatu kebijakan sosial (Bussi et al., 2022; Garritzmann et al., 2023). Data ini memberikan konteks bahwa dukungan masyarakat terhadap MBG tidak berdiri sendiri, melainkan erat terkait dengan keyakinan akan kemampuan pemerintah serta evaluasi umum publik terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kondisi ini sering disebut sebagai partisan policy support, yaitu kecenderungan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang diasosiasikan dengan kelompok politik yang mereka dukung. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan sosial sering kali berkaitan erat dengan tingkat kedekatan masyarakat terhadap institusi dan elite politik yang sedang berkuasa (Gillissen et al., 2026).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dukungan MBG

Sekali lagi, penting untuk dicatat bahwa dukungan publik terhadap kebijakan bersifat dinamis dan tidak permanen. Literatur kebijakan publik menunjukkan bahwa sikap masyarakat dapat berubah seiring perkembangan situasi politik, kondisi ekonomi, maupun pengalaman langsung dalam implementasi kebijakan (Page & Shapiro, 2010; Wlezien, 1995). Teori *policy feedback* juga menekankan bahwa interaksi warga dengan program negara dapat memperkuat atau justru melemahkan legitimasi kebijakan (Hacker & Pierson, 2019). Oleh karena itu, dukungan awal yang besar bukanlah jaminan legitimasi berkelanjutan, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau melemahkan dukungan tersebut.

Gambar 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Publik terhadap MBG



Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor penilaian evaluatif memiliki pengaruh paling kuat terhadap dukungan publik. Keyakinan masyarakat terhadap kapabilitas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik berpengaruh signifikan, di mana setiap kenaikan 1 poin persepsi meningkatkan dukungan terhadap MBG sebesar 0.92 poin ($\beta = 0.917$, $p < 0.01$. Lihat Tabel 3). Demikian pula, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah atau *approval rating* juga berpengaruh positif ($\beta = 0.841$, $p < 0.01$). Efeknya hampir mendekati 1, sehingga menegaskan adanya hubungan substantif antara evaluasi publik atas performa pemerintah dengan penerimaan kebijakan MBG.

Selain penilaian evaluatif, faktor afiliasi politik turut menjadi determinan penting. Pemilih pasangan Prabowo–Gibran dalam Pilpres 2024 memiliki dukungan lebih tinggi terhadap MBG, sekitar 1.15 poin lebih besar dibanding kelompok pemilih lain ($\beta = 1.152$, $p < 0.01$). Hal yang sama terlihat pada pemilih partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, dan Partai Garuda, yang menunjukkan dukungan 0.30 poin lebih tinggi dibandingkan pemilih partai non-KIM ($\beta = 0.295$, $p < 0.05$). Temuan ini mengindikasikan adanya dimensi partisan yang kuat dalam penerimaan MBG, meskipun secara agregat dukungan publik tetap cukup luas.

Faktor demografis juga memperlihatkan pola dukungan yang menarik. Dari sisi gender, laki-laki cenderung memiliki tingkat dukungan lebih rendah ($\beta = -0.416$, $p < 0.01$), sehingga dukungan relatif lebih tinggi di kalangan perempuan. Temuan ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya tentang *welfare attitude*, yang menyebut bahwa kebijakan perlindungan sosial umumnya bersifat *gender-sensitive*, dan karenanya sering memberi dampak lebih besar pada perempuan, sebab berkaitan langsung dengan peran dalam keluarga atau rumah tangga (Perera et al., 2022). Studi internasional tentang program gizi sekolah juga menunjukkan kelompok perempuan lebih responsif karena isu pangan dan kesehatan keluarga lebih dekat dengan peran sosial yang mereka emban (World Food Programme, 2022).

Tingkat pendidikan berkorelasi negatif dengan dukungan: semakin tinggi pendidikan, semakin rendah dukungan yang diberikan ($\beta = -0.189$, $p < 0.01$). Hal ini dapat dijelaskan karena kelompok berpendidikan tinggi lebih kritis dan cenderung mempertanyakan efektivitas serta efisiensi alokasi anggaran besar untuk MBG. Selain itu, masyarakat perkotaan juga menunjukkan dukungan lebih rendah dibandingkan masyarakat pedesaan ($\beta = -0.215$, $p < 0.10$). Di pedesaan, persoalan gizi mungkin masih dirasakan nyata sehingga program dipandang lebih mendesak. Sebaliknya, kelompok perkotaan dengan kondisi ekonomi relatif lebih baik mungkin menilai manfaat MBG

tidak terlalu signifikan dibandingkan bekal makanan yang biasa mereka sediakan sendiri untuk anak-anak mereka sehari-hari.

Tabel 3. Faktor Dukungan terhadap MBG

Dukung MBG	Coef.	St.Err	t-value	p-value	[95% Conf	Interva l]	Sig
Kapabilitas	.917	.14	6.57	0	.643	1.191	***
Approval rating	.841	.125	6.72	0	.595	1.087	***
Pilihan Capres: Prabowo	1.152	.171	6.74	0	.816	1.487	***
Pilihan partai: KIM	.295	.135	2.19	.029	.03	.56	**
Gender: Laki-laki	-.416	.127	-3.27	.001	-.666	-.166	***
Tingkat pendidikan	-.189	.062	-3.04	.002	-.311	-.067	***
Tempat tinggal: kota	-.215	.128	-1.67	.095	-.466	.037	*
Constant	2.168	.429	5.06	0	1.327	3.009	***
Mean dependent var		7.551	SD dependent var			2.434	
R-squared		0.267	Number of obs			1080	
F-test		55.872	Prob > F			0.000	
Akaike crit. (AIC)		4648.9	Bayesian crit. (BIC)			4688.818	

40

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Tantangan Keberlanjutan MBG

Secara keseluruhan, temuan di atas menegaskan bahwa penerimaan publik terhadap program MBG dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor penilaian evaluatif (kepercayaan atas kapabilitas pemerintah dan evaluasi kinerja pemerintah), faktor afiliasi politik (pilihan capres dan partai saat pemilu), dan karakteristik demografis. Faktor penilaian evaluatif, yakni persepsi publik tentang kapabilitas pemerintahan dan tingkat kepuasan (approval), tampak sebagai penentu utama legitimasi awal MBG.

Penelitian Syrstad et al. (2025) menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat terhadap implementasi kebijakan sosial dapat memengaruhi tingkat kepercayaan politik dan dukungan terhadap pemerintah. Dengan demikian, keberlanjutan dukungan

masyarakat terhadap MBG akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga kualitas distribusi program, keamanan pangan, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan

Implikasi kritisnya dua arah. Pertama, ketika kapabilitas dan approval tinggi, legitimasi program meningkat cepat sehingga pelaksanaan dapat lebih lancar; masyarakat lebih sabar menerima masalah implementasi awal dan memberi ruang bagi pemerintah memperbaiki persoalan teknis. Namun, ketergantungan pada sentimen evaluatif juga membuat dukungan bersifat rapuh. Kinerja implementasi MBG, baik dalam distribusi, kualitas makanan, maupun keamanan pangan, akan segera tercermin pada tingkat kepuasan publik. Jika pelaksanaan mengecewakan, kapabilitas pemerintah dipertanyakan, dan tingkat kepuasan menurun, maka dukungan masyarakat dapat menyusut secara tajam. Dengan kata lain, evaluasi yang positif di awal bukan jaminan jangka panjang, ia menuntut konsistensi dan mekanisme cepat perbaikan agar tidak berubah menjadi sumber kekecewaan publik.

Kemudian yang *kedua*, faktor afiliasi politik (pilihan capres/partai) memperlihatkan bahwa MBG juga diperlakukan sebagian sebagai isu partisan. Mereka yang merupakan pendukung kelompok yang saat ini berkuasa cenderung memberi “*reward*” berupa tingkat dukungan yang lebih tinggi, sementara non-pendukung bisa lebih skeptis. Konsekuensinya, kelompok masyarakat seperti ini relatif toleran terhadap kemungkinan politisasi dalam pelaksanaan kebijakan, yang biasanya meliputi cakupan atau alokasi pelaksanaan MBG, rekrutmen mitra pelaksana, atau prioritas wilayah, sehingga mengurangi efisiensi dan tujuan capaian yang luhur. Lebih jauh, jika pergantian politik terjadi, program yang sangat terkait dengan identitas partisan berisiko dipangkas atau dilemahkan pada pemerintahan berikutnya, sehingga mengancam keberlanjutan.

Kesimpulan

Secara ringkas temuan ini memperlihatkan bahwa kapabilitas dan kepuasan kinerja pemerintah memberi jembatan cepat menuju legitimasi, tetapi juga mensyaratkan kinerja nyata. Sementara afiliasi politik memberi dukungan awal namun berpotensi membuat program menjadi rentan terhadap dinamika partisan. Implikasinya ialah bahwa keberlanjutan dukungan program akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga performa, mengelola persepsi publik lintas partisan, serta memastikan manfaat program dirasakan secara nyata terutama oleh kelompok yang paling membutuhkan. Jika faktor-faktor ini dapat dikelola dengan baik, MBG

berpotensi menjadi kebijakan populis yang bukan hanya diterima luas pada tahap awal, tetapi juga bertahan sebagai program dengan legitimasi jangka panjang.

Dari perspektif kebijakan hari ini, situasi MBG menghadapi tantangan serius yang tidak lagi hanya soal beban anggaran atau persepsi publik, melainkan soal keamanan pangan dan kapasitas institusi pelaksana. Dalam konteks ini, strategi ganda yang menekankan penguatan kapabilitas teknis dan pembatasan politisasi menjadi sangat mendesak. Pertama, institusionalisasi MBG melalui undang-undang atau peraturan lintas partai akan memperkuat stabilitas program dan meminimalkan risiko perubahan karena dinamika politik. Kedua, transparansi *real-time*, audit independen, serta sistem pengaduan dan evaluasi insiden sangat penting agar kasus keracunan tidak melemahkan dukungan terhadap program lebih jauh. Pelaksanaan program harus menitikberatkan kualitas: standar menu gizi, protokol kebersihan ketat, rantai pasok, dan pelatihan juru masak agar pengalaman penerima positif dan memperkecil potensi *policy feedback* secara negatif.

Perlu pula penguatan tata kelola lokal dan partisipasi sekolah/guru. Sekolah dan guru, yang berada di garda depan pelaksanaan, seharusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, supervisi, dan pengawasan. Keterlibatan UMKM lokal sebagai pemasok dengan sertifikasi dapat menambah kepemilikan sosial, sekaligus mengurangi kecenderungan distribusi yang dipolitisasi. Strategi komunikasi harus diarahkan khusus pada kelompok kritis (urban, kelompok pendidikan tinggi), dengan menyajikan data tentang pengaruh gizi nyata, catatan keamanan yang transparan, dan capaian.

Dalam jangka panjang, program MBG hanya bisa bertahan jika dibarengi dengan penguatan finansial dan politik. Penganggaran yang dibuat bertahap dan memiliki cadangan, termasuk melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dapat membantu menjaga keberlanjutan program meskipun terjadi pergantian aktor politik. Evaluasi dampak yang dilakukan secara independen, baik melalui studi jangka panjang maupun survei kuantitatif, perlu dijadikan dasar legitimasi berbasis bukti, terutama ketika publik mulai meragukan efektivitas dan keamanan program setelah kasus keracunan. Selain itu, pengawasan lintas partai bersama tokoh masyarakat juga penting agar MBG tidak dipandang sekadar sebagai proyek politik sesaat, melainkan sebagai kebijakan nasional yang diakui sebagai kebutuhan bersama.

Pernyataan Keaslian

Artikel ini adalah asli dan tidak diajukan dalam jurnal manapun. Artikel ini adalah murni gagasan, rumusan, dari para peneliti, tanpa bantuan pihak lain. Artikel ini tidak terdapat

karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi.

Referensi

- BPKP Kemenkes. (2024). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024*.
- Bussi, M., Dupuy, C., & Van Ingelgom, V. (2022). Does social policy change impact on politics? A review of policy feedbacks on citizens' political participation and attitudes towards politics. *Journal of European Social Policy*, 32(5), 607–618.
- Detikcom. (2025, September 29). Dapur-Chef dievaluasi buntut menu MBG bikin siswa keracunan. *Detiknews*.
- Dreze, J., & Goyal, A. (2003). Future of mid-day meals. *Economic and Political Weekly*, 4673–4683.
- Garritzmann, J. L., Neimanns, E., & Busemeyer, M. R. (2023). Public opinion towards welfare state reform: The role of political trust and government satisfaction. *European Journal of Political Research*, 62(1), 197–220.
- Gillissen, M., Goubin, S., & Ruelens, A. (2026). Social Policy and Political Trust : Long-Term Effects of Welfare Generosity in Europe. *Political Studies*, 74(2), 747–769. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00323217251340857>
- Goubin, S., & Kumlin, S. (2022). Political Trust and Policy Demand in Changing Welfare States: Building Normative Support and Easing Reform Acceptance? *European Sociological Review*, 38(4), 590–604. <https://doi.org/10.1093/esr/jcab061>
- Hacker, J. S., & Pierson, P. (2019). Policy feedback in an age of polarization. In *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* (Vol. 685, Issue 1, pp. 8–28). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Haq, M. R. F., Irfanda, P. D., Ramadhani, F., Nurhasanah, W., & Widiyarta, A. (2023). Pengaruh Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap Status Gizi Balita Desa Sumberuko Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1964–1970.
- Kalton, G., & Flores-Cervantes, I. (2003). Weighting methods. *Journal of Official Statistics*, 19(2), 81.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota keuangan RAPBN 2025*.

- Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan>
- Lestari, D. L., Gusmira, Y. H., A'arif, M., & Amelia, A. Y. (2024). Free nutritious meal policy as a solution to overcoming the stunting problem in Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10021–10031.
- Locke, A., James, M., Jones, H., Davies, R., Williams, F., & Brophy, S. (2025). Impacts of global school feeding programmes on children's health and wellbeing outcomes: a scoping review. *BMJ Open*, 15(10), e093244.
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364–1373.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjakiah, N., Dharma, A. S., & Gunade, D. T. (2024). Efektivitas Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Program Bantuan Benih Tanaman Padi). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(3), 498–508.
- Page, B. I., & Shapiro, R. Y. (2010). *The rational public: Fifty years of trends in Americans' policy preferences*. University of Chicago Press.
- Perera, C., Bakrania, S., Ipince, A., Nesbitt-Ahmed, Z., Obasola, O., Richardson, D., Van de Scheur, J., & Yu, R. (2022). Impact of social protection on gender equality in low-and middle-income countries: A systematic review of reviews. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), e1240.
- Qomarrullah, R., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Sidaner, E., Balaban, D., & Burlandy, L. (2013). The Brazilian school feeding programme: an example of an integrated programme in support of food and nutrition security. *Public Health Nutrition*, 16(6), 989–994.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. CV. Alfabeta.
- Syrstad, T., Haugsgjerd, A. H., & Kumlin, S. (2025). Iceberg of discontent? Emotional responses to welfare state development and political trust. *Journal of European Social Policy*, 35(5), 500–515.
<https://doi.org/10.1177/09589287251337883>
- Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on

- educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 4051.
- Wlezien, C. (1995). The public as thermostat: Dynamics of preferences for spending. *American Journal of Political Science*, 981–1000.
- World Food Programme. (2022). *State of school feeding worldwide 2022*. Publications.Wfp.Org.<https://publications.wfp.org/2022/state-of-school-feeding/>